



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KECAMATAN SANGATTA UTARA 2025
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara. Kinerja Kecamatan Sangatta Utara diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sangatta Utara, 14 Januari 2026

Camat



Hasdiah SE.,M.Bi
Pembina Tingkat I/Wb
NIP. 197412212001122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kondisi Wilayah	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	14
E. Landasan Hukum	16
F. Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	49
B. Realisasi Anggaran	79
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
BAB IV PENUTUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sangatta Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kondisi Wilayah

Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 yang mengatur pembagian wilayah Negara “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”, bahwa Camat sebagai pimpinan Kecamatan disamping melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk urusan otonomi daerah, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahanyang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan kelurahan;

- h. Melaksanakan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- j. Mengkoodinasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

gambaran geografis wilayah Kecamatan yang terkait dengan faktor – faktor penunjang kegiatan Bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :
Kecamatan Sangatta Utara adalah salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, terletak di sebelah selatan dari ibu kota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta Utara) yang merupakan pusat pengembangan kawasan Kutai Timur dengan batas – batas wilayah :

Utara : Kecamatan Bengalon
Timur : Selat Makassar
Selatan : Kecamatan Sangatta Selatan
Barat : Kecamatan Rantau Pulung



Luas wilayah $\pm$ 33.356,74 Ha atau 333,57 km² yang terdiri dari :

1. Kelurahan Teluk Lingga : $\pm 3.144,66$ Ha
2. Desa Sangatta Utara : $\pm 4.756,20$ Ha
3. Desa Singa Gembara : $\pm 5.648,78$ Ha
4. Desa Swarga Bara : $\pm 19.807,10$ Ha

Penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan, sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan, sementara sebagai subjek, penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan, oleh karena itu, penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara. Jumlah penduduk Kecamatan Sangatta Utara pada tahun 2025 sesuai data profil Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 sebanyak ± 116.630 jiwa, terdiri dari 61.020 Laki-laki dan 55.610 perempuan.

Jumlah Penduduk Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah KK	Total Jiwa
		L	P		
1	Kelurahan Teluk Lingga	11.936	11.708	7.242	23.644
2	Desa Sangatta Utara	24.101	21.973	14.637	46.074
3	Desa Singa Gembara	11.475	8.810	5551	20.285
4	Desa Swarga Bara	8.841	8.134	5515	16.975
	Jumlah	56.353	50.625	32.945	106.978

Sumber : Profil Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

Desa Persiapan

(Data Penduduk yang Termasuk di desa induk yaitu desa sangatta utara)

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah KK	Total Jiwa
		L	P		
1	Desa Persiapan Teluk Rawa	2.799	2.447	1.597	5.246
2	Desa Persiapan Sangatta Prima	5.167	5.089	2904	10.256
3	Desa Persiapan Singa Karta	4.194	3.839	2521	8.033
	Jumlah	12.160	11.375	7.022	23.535

Dapat dilihat dari Tabel diatas penduduk laki-laki di Kecamatan Sangatta Utara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Dalam pembangunan suatu wilayah, salah satu aspek yang sangat penting adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM berkualitas mencakup individu-individu yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan motivasi untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan mereka sendiri, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama melalui program-program pembangunan yang difokuskan pada pendidikan, baik dalam bentuk formal maupun non-formal, dengan target yang tepat dan relevan. Angka Partisipasi Sekolah Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7-12 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai APS Kecamatan Sangatta Utara mencapai 99,37%, meningkat dari sebelumnya Tahun 2021 hanya 91,17%. Sementara itu, pada kelompok usia 13-15 tahun juga terjadi peningkatan nilai APS dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai APS mencapai 68,00%, naik dari nilai sebesar 65,20% pada tahun 2021.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya. Data Aparatur Kecamatan sebagai berikut :

Daftar Pegawai ASN Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

NO	NAMA	GOL/ RUANG	JABATAN
1.	Hasdiah, SE.,M.Si	IV/b	Camat

2.	Muhamad Yunus, SE., M.Si	IV/a	Sekretaris Kecamatan
3.	Nani Uminarti,S,Th,M.Si	IV/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4.	Elysabeth Artikawati,S.ST	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5.	Bernadus Parembang,SP	III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan PLT Kasi Pelayanan Umum
6.	Siti Marfuah, SE	III/d	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
7.	Noorma, S.STP	III/d	Lurah
8.	Dra. Hariyati	III/d	Sekretaris Lurah
9.	Muhammad Rusdi Amin, SE	III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.	Hj. Mardiana, S.Sos	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
11.	Yusfina Pamilangan, S.M	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
12.	Yulinda Oktiana,S.Sos	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
13.	Evrin Abriantikah, S.IP	III/c	Fasilitator Pemerintahan
14.	Arrang Bulan, SE	III/c	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
15.	Abd. Wahab Agus, SE	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
16.	Nurhayati, S.A.P	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
17.	Hj. Munawwarah, S.Sos	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
18.	Yanti Tonapa, SH	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
19.	Artanti, S.Sos	III/a	Fasilitator Pemerintahan
20.	Durahman, SE	III/a	Pamong Pemerintahan
21.	Leginem Rohayanti	III/a	Penata Layanan Operasional
22.	Muhammad Yamani	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
23.	Wilhelmus Wio Doi, SE	III/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
24.	Abdul Syakeer	III/a	Pengadministrasi Perkantoran

25.	Muhammad Azis Padu	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
26.	Muslim Azhari	II/d	Penata Layanan Operasional
27.	Dorina Lara Saty	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
28.	Rafli Diasamo	II/d	Penata Layanan Operasional
29.	Suro Edipudjono	II/d	Penata Layanan Operasional
30.	Nono Hariyanto	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
31.	Dahliah	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
32.	Dentiar Candra Samudya,A.Md.Kom	II/c	Pranata Komputer Terampil
33.	Sulanja Septian,A.Md	II/c	Arsiparis Terampil

Daftar Pegawai PPPK Pada Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

NO	NAMA	Gol	JABATAN
1	M. Jami	V	Pengadministrasi Perkantoran
2	Slamet Zaenal Arifin	V	Pengadministrasi Perkantoran
3	Devi Puspitasari, SE	IX	Penata Layanan Operasional
4	Dindum	V	Pengadministrasi Perkantoran
5	Prihatin, SE	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Arifain	V	Pengadministrasi Perkantoran
7	Ruslan	V	Pengadministrasi Perkantoran
8	Rusdi Rasyid	V	Pengelola Data dan Informasi
9	Supran	V	Pengadministrasi Perkantoran
10	Yevita Nugraha Sagita Palinggi, S.Hut	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Hj. Fauzah Maulidiyah, SE	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
12	Erviyani, S.I.Kom	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
13	Arman	V	Pengelola Data dan Informasi
14	Novianti Dudung	V	Pengelola Data dan Informasi
15	Indariyana Rusnong		Pengadministrasi Perkantoran
16	Linda Jumiati Siregar, SE	IX	Penata Layanan Operasional

17	Reni Jaya, SE	IX	Pengelola Data dan Informasi
18	Belly Pratama Ersal, AP	V	Penata Layanan Operasional
19	Siti Fatimah	V	Pengadministrasi Perkantoran
20	Kasifah, S.IP	IX	Pamong Pemerintahan
21	Astri Utari, S.M	IX	Penata Layanan Operasional
22	Fajar Alhamdani	V	Pengadministrasi Perkantoran
23	Gresya	IX	Penata Layanan Operasional
24	Sarah Sriyanti Siaba	IX	Pengadministrasi Perkantoran
25	Achmad Suryansyah Al Payet	V	Pengadministrasi Perkantoran
26	Jeni Widlandini	IX	Pengelola Data dan Informasi
27	Eka Widarna	V	Pengadministrasi Perkantoran
28	Bejo Selamat, S.Hut	IX	Penalaah Teknis Kebijakan
29	H. Wahyu Purwadi, S.Sos	IX	Penata Kelola Pemerintahan
30	Ahmad Musyafi	V	Penata Layanan Operasional
31	Samsul	V	Penata Layanan Operasional
32	Muh. Hardiansyah Mustapa	V	Penata Layanan Operasional
33	Ramadhani Asmianata, S.Sos	IX	Penalaah Teknis Kebijakan
34	Areskya Rahmah, S.Pi	IX	Penalaah Teknis Kebijakan
35	Wahidah, S.P	IX	Penalaah Teknis Kebijakan
36	Taufik	VI	Arsiparis Terampil

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kantor Camat Sangatta Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik

dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Klasifikasi berdasarkan tipe Kecamatan Sangatta Utara masuk dalam Tipe A untuk memudahkan pelaksanaan tugas dengan beban kerja yang besar. Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas :

A. Susunan Organisasi Kecamatan, yaitu :

1) Camat, mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat Kecamatan, yaitu

2) Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- Menyiapkan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, membawahi sub bagian yang dipimpin kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris Kecamatan :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas :

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta asset, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program monitoring evaluasi dan pelaporan.

3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat masyarakat di Kecamatan;

- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayah Kecamatan;
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
- Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan di Desa;
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan;
- Kegiatan pemberdayaan kelurahan;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- Evaluasi Kelurahan;
- Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan;

- Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan;
- Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga kemasyarakatan;
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM);
- Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kelurahan.

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Bupati;
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6) Seksi Pemerintahan Umum, mempunyai tugas :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Bupati;
- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antar sukudan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Penangan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan.

7) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, mempunyai tugas :

- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;
- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa;
- Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat

sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Sangatta Utara



D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat dimasa yang akan datang dalam rangka menunjang Pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Sangatta Utara periode 2025-2029 sebagai berikut :

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangatta Utara.
- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Sangatta Utara periode 2025-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Sangatta Utara untuk cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator terealisasi semuanya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan pelayanan dan lain-lain
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ Internasional . Dari visi dan misi Kantor Kecamatan Sangatta Utara terhadap pencapaian visi Kabupaten yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

- | | |
|---------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sangatta Utara menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, yaitu: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas". Tujuan 4 sebagaimana tersebut adalah "Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif " dan Sasaran 1 "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional , Efektif, Adaptif, dan Visioner" berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat tercapai.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara											
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Pelayanan Publik (Ipopda)	2,00	2,45	2,51	2,73	2,98	2,88	3,11	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Indeks Kacamatan)	87,86	95	96	91	92	93	94	

Sumber : Renstra Kecamatan Sangatta Utara periode 2025-2029

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	(02) 7.01.0.00.02.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,00	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	87,80	88	90	91	92	93	94	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025.

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDUKTOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
011	002	002	041	002	000	001	000	000	000	000
7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara										
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Penguasaan Perekonomian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terwujudnya tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	1.1	Presentase capaian tata Kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	%	100
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan Masyarakat	2.2	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum)	Kegiatan	5
3	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	3.1	Persentase Peran Masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan (Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)	%	100
		3.2	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Pelanggaran	0
		3.3	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Pelayanan	20
		3.4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Sangatta Utara :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Belanja	Pagu	Indikator	Satuan	Target Kinerja
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Camat Sangatta Utara	14.178.607.964,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.238.535.503,00	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	%	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.870.579,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.090.579,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.780.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.445.369.932,00	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.234.196.912,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	73
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	199.200.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.973.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.510.300,00	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.682.300,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.828.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	39.600.500,00	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.279.500,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	11.321.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Dokumen	1
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.903.140,00	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	3
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.893.500,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.693.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.016.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.052.640,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	484.445.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.403.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.660.000,00	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.660.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.051.072,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	648.051.072,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.070.000,00	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.310.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.660.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.100.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.990.150,00	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan	39
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	79.996.950,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.996.950,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	11.997.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	1
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11.997.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.996.200,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Laporan	1

7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	69.996.200,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	300
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	729.236.100,00	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	%	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	429.236.500,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	1
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150.000.000,00	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	15
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	279.236.500,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	299.999.600,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	1
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	99.999.600,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	50

7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200.000.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	50
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.999.768,00	Jumlah Pelaksanaan Perda/Pertada	Pelaksanaan	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94.999.768,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	74.999.768,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54.999.500,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	54.999.500,00	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Laporan	1

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	768.904.973,00	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	768.904.973,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Laporan
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	271.046.173,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	420.496.800,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Orang
				100

Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat	%
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan
7.01.06.2.01.0001	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kantor Lurah Tebuk Lingga		
7.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	%
			100

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.056.000,00	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.056.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000,00	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.157.750,00	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	3
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.644.214,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.994.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.978.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.997.536,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.098.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.446.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.660.000,00	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.250.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.410.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.745.800.250,00	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Persen	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.745.800.250,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.746.530,00	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	5

7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.009.542.720,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	56
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.701.511.000,00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Evdoren Mumi Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan Anggaran Pada Tahun dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya tata Kelola organisasi pemerintah yang baik	1.1	Presentase capaian tata Kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	%	100
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa	2.2	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum)	Kegiatan	5
3	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	3.1	Persentase Peran Masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan (Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)	%	100
		3.2	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Pelanggaran	0

		3.3	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Pelayanan	32
		3.4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	%	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangattan Utara Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Belanja	Pagu	Indikator	Satuan	Target Kinerja
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Camat Sangatta Utara	12.178.607.984,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ADOTA	11.734.288.791,00	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	%	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.483.667,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.316.267,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.167.400,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.306.797.656,00	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.207.707.656,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.090.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.656.000,00	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.656.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.841.140,00	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	3
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.893.500,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.693.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.566.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	295.582.640,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.703.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.403.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	827.540.328,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	674.540.328,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.970.000,00	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.310.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.660.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.571.675,00	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan	39
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.156.675,00	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Laporan	2
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.156.675,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0,00			0
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.415.000,00	Jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat	Laporan	1
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.415.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	300

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.998.000,00	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	%	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	118.998.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	1
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	118.998.000,00	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	15
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	1
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	117.204.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	50
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	82.796.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	50

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.374.518,00	Jumlah Pelaksanaan Perda/Perkada	pelanggaran	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	61.374.518,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.014.518,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.360.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah	laporan	1
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum	5.534.000,00	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	5
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.534.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.534.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	10
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.841.000,00	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	%	100
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	10.841.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1
7.01.06.2.01.0001	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan	7.241.000,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	1

7.01.06.2.01.0003	Peraturan Kepala Desa	3.600.000,00	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1
7.01.01.00.0.00.02.0001	Kantor Lurah Teluk Lingga	10.294.674.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	492.063.750,00	Callutan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	%	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.056.000,00	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.056.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000,00	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2
7.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.347.750,00	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	3
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.644.214,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.994.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.978.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.997.536,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.288.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.446.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.000.000,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg	4
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.660.000,00	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.250.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.410.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.802.610.250,00	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	persen	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.802.610.250,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	laporan	1
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.746.530,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.066.352.720,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	56
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.701.511.000,00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Evdoren Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara									
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,00	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	87,80	88	90	91	92	93	94	

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Keban	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%

		gsaan dan Ketahanan Nasional						
2	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	67,65			67,65		
3	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	69,72			69,72		

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketertarikan dan Ketertiban	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100%

		(penyele nggaraa n urusan pemerint ahan umum)			
		Cakupan peran masyara kat dalam pembang unan di wilayah Kecamat an (pember dayaan masyara kat Desa dan Keluraha n)	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Cakupa n Fasilitasi, Pembina an, Pengawa san Pemerint ahan Desa (Desa dengan pelapora n keuanga n tertib dan baik)	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Penyelen ggaraan Pelayana n Publik (rata-rata nilai survey kepuasa	1 Laporan	1 Laporan	100%

		n masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan)			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Jumlah Dokumen SAKIP (Nilai Predikat AKIP merupakan hasil pengukuran Kinerja OPD)	70	73	100%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Sangatta Utara
Rata-rata 97,66%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	Target Indikator Tahun 2025	Capaian Realisasi	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	SOLUSI YANG DI LAHUKAN
1.01.01 - PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA						
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diikutsertakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rincian DPA SAKIP secara tahunan, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77		Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dapat diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan				
Tersedianya dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dapat diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rahisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rahisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dapat diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dapat diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rahisar Realisasi Kinerja SKPD						

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	24	24	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	69	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.02.0005 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	69	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.02.3004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	24	24	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Tersedianya dokumen perencanaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					
7.01.01.2.03.0008 - Pembastutan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Tersedianya Laporan Pembastutan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembastutan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomodifikasi dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarnya.
	Jumlah Paket Pakan Onas beserta Abilit Kelengkapan (Paket)	3		100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomodifikasi dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarnya.
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai (Unit)	2	2	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomodifikasi dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarnya.
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai						

Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						
Tersedianya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Peningkat Daerah						
Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peraturan Rumah Tangga yang Disiapkan (Paket)					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan (Paket)	2	2	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	21	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24	24	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	29	24	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	21	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)					
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

7.01.01.2.06.0005 - Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Tertindakannya Fasilitas/ Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24	24	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarnya.
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	29	24	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarnya.
7.01.01.2.06.0010 - Peraturan/Asas Dinamis pada SKPD						
Tertindakannya Peraturan/Asas Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Peraturan/Asas Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarnya.
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Perwakilan Daerah						
Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarnya.
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Ranja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.06 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah						
Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	12	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Ranja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	12		Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Ranja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	12	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Ranja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	12	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Ranja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Bangun Mak. Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah						
Tersedianya laporan pemeliharaan bangun mak. daerah penunjang urutan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	21	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat diperuhi kebutuhan anggarnya.
	Jumlah Gedung Kendar dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dinhabatkan (Unit)	2	36	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat diperuhi kebutuhan anggarnya.
	Jumlah Ase Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	38	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat diperuhi kebutuhan anggarnya.
7.01.01.2.09.0001 - Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	21	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat diperuhi kebutuhan anggarnya.
7.01.01.2.09.0002 - Pemeliharaan Ase Tetap Lainnya						

Tertindakannya Pemeliharaan Asas Tetap Lainnya	Jumlah Asas Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	36	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Restorasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Tertindakannya Pemeliharaan/Restorasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Restorasi (Unit)	2	26	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
MENINGKATKANNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGGATA UTARA	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	50	58	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Tersedianya laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	100%	Pemeriksaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan secara konsisten, sehingga dapat diperoleh kebutuhan anggarannya.
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpakkan kepada Camat						
Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpakkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	100%	Pemeriksaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan secara konsisten, sehingga dapat diperoleh kebutuhan anggarannya.
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	100%	Pemeriksaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan secara konsisten, sehingga dapat diperoleh kebutuhan anggarannya.
7.01.03 - PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						

MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	50	66	133%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Terdapatnya laporan pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		5	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)					
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)					
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		5	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Terdapatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)					
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang dilaksanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan						
Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)					
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Uraian Masyarakat yang di akomodir (%)	50	65	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang dilaksanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Terselenggaranya Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang dilaksanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	15	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang dilaksanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.04.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	15	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.01.0005 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.06 - Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Perumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menunjukkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Rangka dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kelelahan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SAPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kelelahan Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kelelahan Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SAPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kelelahan Masyarakat akan Peningkatan Perilaku dan Penguatan Penguatan dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SAPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kelelahan Masyarakat akan Peningkatan Perilaku dan Penguatan Penguatan dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						

Tertekannya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan akan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						
Tertekannya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan akan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						
Tertekannya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan akan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bertalenta Saing						

Tertetapkannya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.02.2.08.0007 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						
Tertetapkannya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	100	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Prosentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	50	50	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						

Terselenggara Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diimplementasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diimplementasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
Terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diimplementasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diimplementasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						

MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	12	15	20%	Pemerataan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.31.05.2.91 - Peningkatan Urutan Pemertintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah						
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Urutan Pemertintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertintahan dan Pemertintahan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	90	100%	Pemerataan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan Antar Suku, dan Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	100	100	100%	Pemerataan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diutamakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Dharmika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Tertaksennanya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Dharmika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Dharmika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	50	100%	Penyusunan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan dokumentasikan dalam smpai pada Renc dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat diikuti kebutuhan angggarannya.
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Ibra Suku, Unit Birojama, Rai, dan Golongan Lainnya guna Memajukan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						

Tersedianya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Umat Sekeliling, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Umat Sekeliling, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	100	100	100%	Pemerluhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
Tersedianya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	100%	Pemerluhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGANTARAN DESA						
MENINGKATKAN PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	50	45	100%	Pemerluhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.06.2.01 - Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Tersedianya Laporan hasil Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Tersedia dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	100%	Pemerluhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

	Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Pengkajian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	1	100%	Pemerutan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan.	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	100%	Pemerutan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan.	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pemasaran, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pencapaian Status Desa (Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keterlibatan Umum (Dokumen)					
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						
Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	100%	Pemerutan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan.	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renta dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
7.01.06.3.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa						

Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Disesatkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disesatkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	3	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum						

Uraian penjelasan tabel :

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Sangatta Utara mempunyai Tujuan, sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaiannya sesuai dengan target yang dibuat, factor pendukungnya sesuai dengan Pemenuhan anggaran program dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan dan Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	67,65	Menunjang
		IP ASN / Indeks profesionalitas ASN	77	Menunjang
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6-9 Dokumen	Menunjang
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Menunjang
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	Menunjang
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Menunjang
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Menunjang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Menunjang

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Menunjang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Menunjang
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Menunjang
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	38 unit	Menunjang
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	Menunjang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	100%	Menunjang
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	Menunjang
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Laporan	Menunjang
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait non perizinan	1 Laporan	Menunjang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir	100%	Menunjang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	Menunjang

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga	Menunjang
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan	4 Laporan	Menunjang
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Laporan	Menunjang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Laporan	Menunjang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Laporan	Menunjang
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Menunjang
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Dokumen	Menunjang
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Orang	Menunjang
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	Menunjang
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Orang	Menunjang
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	Menunjang
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	Menunjang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Menunjang

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	100%	Menunjang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Laporan	Menunjang
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Menunjang
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Menunjang
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Menunjang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100%	Menunjang
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	Menunjang
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Menunjang
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Sangatta Utara mempunyai Tujuan,sasaran,program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaiannya sesuai dengan target yang ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	KECAMATAN SANGATTA UTARA	12.378.607.984	10.353.094.547	83,64%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.834.288.791	9.817.165.697	82,96 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.571.675	47.485.500	99,82 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.998.000	311.202.000	97,56 %
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111.374.518	111.303.350	99,94 %
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.534.000	55.102.000	99,22 %
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.841.000	10.836.000	99,95 %
	KANTOR LURAH TELUK LINGGA	18.707.774.040	15.391.123.081	82,27 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	513.423.750	405.400.600	78,96 %

	DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.194.350.290	14.985.722.481	82,36 %

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien si
		Tar get	Realis asi	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realis asi (Rp)	% Capai an	
KECAMATAN SANGATTA UTARA								
1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA	100 %	100%	100%	11.834. 288.79 1	9.817.1 65.697	82,96 %	82,96 %
2	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	69 ora ng	39 Orang	100 %	47.571. 675	47.485. 500	99,82 %	99,82 %
3	PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHA N	100 %	100 %	100 %	318.99 8.000	311.2 02.000	97,56 %	97,56 %

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	100 %	111.374.518	111.303.350	99,94 %	99,94 %
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5 Kegiatan	100 %	100 %	55.534.000	55.102.000	99,22 %	99,22 %
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	100 %	10.841.000	10.836.000	99,95 %	99,95 %
KELURAHAN TELUK LINGGA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	100%	100%	513.423.750	405.400.600	78,96 %	78,96 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100%	100%	18.194.350.290	14.985.722.481	82,36 %	82,36 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 untuk total anggaran Kecamatan Sangatta Utara sebesar Rp. 31.086.382.024,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 25.744.217.628,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran 82,82% terdiri dari anggaran Kecamatan Sangatta Utara Rp. 12.378.607.984,- dengan realisasi anggaran 10.353.094.547,- dengan presentase realisasi 83,64% sedangkan untuk Kelurahan Teluk Lingga Rp. 18.707.774.040,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.391.123.081,- dengan presentase realisasi anggaran mencapai 82,27%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta Utara, 14 Januari 2025

Camat



Hasdiah, SE., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197412212001122002